



LAPORAN MONEV RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
STATISTIK KAB.BANGKA**



KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II ini disusun sebagai instrument untuk menilai tingkat capaian rencana aksi yang dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan serta realisasi keuangan yang direncanakan serta membuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

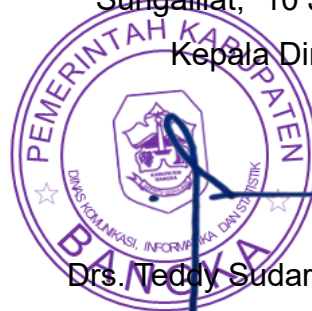
Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen rencana aksi yang telah dibuat dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, indikator kinerja, anggaran serta hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan, perbaikan pelaksanaan program, serta penguatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara target perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Demikian laporan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 10 Juli 2026

Kepala Dinas



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si

NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Tujuan.....	2
 BAB II RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	4
2.1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	4
2.2 Rencana Aksi Perangkat Daerah	5
 BAB III MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH	10
 BAB IV PENUTUP	23
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut setiap Perangkat Daerah untuk mampu melaksanakan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, serta dapat dievaluasi capaian pelaksanaannya secara berkala. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Perangkat Daerah.

Rencana aksi perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam Rencana Strategis (Renstra), maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana aksi memuat langkah-langkah pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan keuangan, jadwal pelaksanaan, serta penanggungjawab terhadap pencapaian kinerja tersebut.

Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi Perangkat Daerah menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi yang disusun, mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja

yang telah ditetapkan. Melalui monitoring dan evaluasi, Perangkat Daerah dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan, tingkat penyerapan anggaran, capaian indikator kinerja, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi rencana aksi Perangkat Daerah juga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, penyusunan program prioritas, serta peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan realisasi keuangan Perangkat Daerah berdasarkan rencana aksi yang dibuat sebagai bagian dari pengendalian dan bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat capaian pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan realisasi keuangan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi yang ditetapkan.
3. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan rencana aksi yang dibuat.
4. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pada Perangkat Daerah.
5. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja dalam pelaksanaan pembangunan.
6. Menjadi bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perjanjian kinerja disusun sebagai bentuk implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menekankan pada pencapaian hasil, efektivitas pelaksanaan program, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan terukur.

Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah selama tahun berjalan. Melalui perjanjian kinerja, setiap sasaran, indikator, target, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur tingkat pencapaiannya secara objektif sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja pembangunan daerah. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Tahun 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	A (82,00)
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Nilai	82
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	%	100

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.988.788.010,00	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	784.290.000,00	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	1.650.617.790,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.250.000,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.275.000,00	APBD
TOTAL		7.444.220.800,00	

2.2 Rencana Aksi Perangkat Daerah

Rencana Aksi merupakan penjabaran operasional yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat langkah-langkah strategis, tahapan pelaksanaan, target capaian, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah selama tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Aksi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana aksi juga menjadi instrumen pengendalian internal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, percepatan pencapaian sasaran pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Aksi Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, baik dari aspek realisasi fisik, keuangan, maupun pencapaian indikator kinerja. Melalui rencana aksi yang tersusun secara sistematis, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kendala pelaksanaan program sejak dini serta menyusun langkah percepatan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk menjaga konsistensi pencapaian target kinerja sampai akhir tahun anggaran. Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Tahun 2026**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun berjalan	Rencana Aksi	Target				Realisasi				Status / progres pencapaian Rencana Aksi	Analisis atas penyebab tercapai atau tidak tercapainya target	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ pemuhan Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6				7				8	9	10	11	12
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,30 (BB)														
																Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	29,53													Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	13,00														
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00													Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	70,00													Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00													Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100,00													Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
1.1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100		1	2	2	0	1	0	0	0				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100														
1.1.1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	4	Menyusun rancangan awal RENJAPD Tahun 2027	1	2	2	0	1	0	0	0	Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Penyusunan Rancangan Awal dilanjutkan dengan Rancangan Renja 2027	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencana
				Menyusun rancangan RENJAPD Tahun 2027		1				0			Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Penyusunan Rancangan dilanjutkan dengan Rancangan Akhir Renja 2027		Perencana
				Menyusun rancangan akhir RENJAPD Tahun 2027			1				0		Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Selesai dilaksanakan		Perencana
				Membuat Perjanjian Kinerja	1				1				Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Selesai dilaksanakan		Perencana
1.2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100		32	32	32	32	32	0	0	0				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	32	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	32	32	32	32	32	0	0	0	Sesuai target	Realisasi Keuangan sesuai dengan Rencana Kas	Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	AKPD Muda
1.3	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	18		0	1	2	1	0	0	0	0				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Meningkatnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25														
1.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	Melakukan Pengadaan Pakaian Olahraga	0	0	1	0	0	0	0	0	Sesuai target	Pengadaan dilakukan sesuai dengan jadwal	menunggu jadwal pengadaan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.3.2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	Mendata pegawai yang akan melakukan pendidikan dan pealtihan berdasarkan tugas dan fungsinya	0	1	1	1	0	0	0	0	Sesuai target	jadwal pendidikan dan pelatihan tentative	merekap pegawai yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.4	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100,00		3	3	3	3	3	0	0	0				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.4.1	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	3	3	3	3	0	0	0	Sesuai target	mengadakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara rutin	Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag umum dan Kepegawaian
1.5	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100		9	9	9	9	9	0	0	0				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.5.1	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	3	3	3	3	3	0	0	0	Sesuai target	pencatatan yang rutin di buku agenda surat keluar dan surat masuk	Menyimpan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.5.2	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Isitrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Pelaksanaan jasa komunikasi, SDA dan Isitrik	3	3	3	3	3	0	0	0	Sesuai target	pembayaran SDA dan listrik sesuai dengan tagihan bulanan	Melakukan monitoring pelaksanaan konsumsi energi dan komunikasi kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.5.3	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	3	0	0	0	Sesuai target	terlaksananya pemenuhan jasa pelayanan umum Kantor	Terpenuhinya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100		13	13	13	13	13	0	0	0				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.6.1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	3	3	3	3	0	0	0	Sesuai target	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai jadwal	Merawat Kendaraan Dinas Operasional dengan baik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.6.2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	10	10	10	0	0	0	Sesuai target	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	merawat peralatan dan mesin lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00														
2	Meningkatnya Keterbukaan Infomasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85,00													Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

2.1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ ditindaklanjuti	100			70				0			Sesuai target	Informasi publik sudah banyak tersedia tersedia web resmi pemda dan web PPID	selalu update informasi publik secara berkala	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JF Pranata Humas
		Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	100										Sesuai target	secara rutin menyebarluaskan informasi publik pemkab bangka di saluran media internal dan kerjasama, serta melalui media ruang ruang milik pemkab bangka	meningkatkan volume informasi publik yang di kelola		JF Pranata Humas
		Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	35										sesuai target	selalu menyebarluaskan informasi publik pemkab bangka secara rutin di web dan akun medsos resmi pemkab	selalu update informasi publik		JF Pranata Humas
2.1.1	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70	melaksanakan kerja sama media cetak maupun online	0	70	70	70	0	0	0	0	tidak sesuai target	disesuaikan dengan anggaran kerja sama	mengajukan penambahan anggaran	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	pengelola kerjasama media dan JF Pranata Humas
2.1.1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	mengadakan sosialisasi tentang pengaduan publik	3	3	3	3	0	0	0	0	tidak sesuai sesuai target	informasi publik sudah banyak tersedia tersedia web resmi pemda dan web PPID	selalu update informasi publik secara berkala	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	JF Pranata Humas
	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	6,10														
3	Menjaga Stabilitas Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100		0	0	0	100	0	0	0	0				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
3.1	Meningkatnya Infrastruktur TIK	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik	100		0	0	0	100	0	0	0	0				Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
3.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	Pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan internet	34	34	34	34	0	0	0	0				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00														
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100		0	0	0	100	0	0	0	0				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.1	Meningkatnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral	Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100		0	0	0	100	0	0	0	0				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
4.1.1	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2	Menyusun Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka	1	1	0	0	1	0	0	0	Sesuai target	Target dapat tercapai karena kerjasama seluruh pegawai opd dalam menyamaakan data kepada Walidata	☑ Bimtek Statistik Sektoral ☑ Pelatihan EPSS ☑ Pelatihan Satu Data Indonesia ☑ Workshop Statistik	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	KEPALA BIDANG STATISTIK SHINTA WIJAYANTI, SE
				Melaksanakan Verifikasi Data Statistik Sektoral OPD	1	1	0	0	1	0	0	0	Sesuai target	Target dapat tercapai karena verifikasi data dilakukan oleh walidata dengan tepat waktu			
				Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka	0	0	1	1	0	0	0	0	Belum mencapai target	target belum tercapai karena forum satu data baru akan			

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala terhadap perkembangan capaian kinerja perangkat daerah, baik dari aspek realisasi fisik, realisasi keuangan, maupun pencapaian indikator kinerja. Sementara itu, evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta menilai kesesuaian antara target dan realisasi capaian kinerja sampai dengan periode pelaporan.

Melalui proses monitoring dan evaluasi, Perangkat Daerah dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi serta mengetahui berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah tindak lanjut, percepatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian strategi pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi antar unit pelaksana guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selain sebagai instrumen pengendalian internal, monitoring dan evaluasi Rencana Aksi juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan terukur, diharapkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pencapaian target

pembangunan daerah secara optimal. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal delapan bulan Juli Tahun 2026 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh pegawai. Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Triwulan II Tahun 2026

[illegible]

	Daerah																								
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100,00																					
1.1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	1	9.560.000	2	0	2	3.000.000	0	2.340.000	2	9.560.000	0	0									
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100																					
1.1.1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	4		9.560.000	2	0	2	3.000.000	0	2.340.000	2	9.560.000	0	0			Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Penyusunan Rancangan Awal dilanjutkan dengan Rancangan Renja 2027	Perencana			
							1								0			Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Penyusunan Rancangan dilanjutkan dengan Rancangan Akhir Renja 2027	Perencana				
															0			Sesuai target	Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal	Selesai dilaksanakan	Perencana				
					1								1					Sesuai target	Penyusunan dilakukan dengan jadwal	Selesai dilaksanakan	Perencana				
1.2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100	3 2	1.071.711.148	3 2	1.183.189.686	3 2	1.071.711. 148	3 2	881.531.228	3 2	1.071.711.148	0	1.183.189.686	0	0	0	0					
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	32	3 2	1.071.711.148	3 2	1.183.189.686	3 2	1.071.711. 148	3 2	881.531.228	3 2	1.071.711.148	0	1.183.189.686				Sesuai target	Realisasi sesuai dengan Rencana Kas	Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas	AKPD Muda		

1.3	Meningkatkan kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	18		0	0	1	31.000.000	2	39.400.000	1	25.950.000	0	0	0	31.000.000	0	0	0	0				
	Meningkatnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25																					
1.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	Melakukan Pengadaan Pakaian Olahraga	0		0		1	9.600.000	0	150.000	0	0	0	0					Sesuai target	Pengadaan dilakukan sesuai dengan jadwal	menunggu jadwal pengadaan	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepegawaian
1.3.2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	Mendata pegawai yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	0		1	31.000.000	1	29.800.000	1	25.800.000	0	0	0	31.000.000					Sesuai target	jadwal pendidikan dan pelatihan tentative	merekap pegawai yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepegawaian
1.4	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100,00		3	56.305.000	3	50.886.205	3	30.300.000	3	20.458.795	0	56.305.000	0	50.876.205	0	0	0	0				
1.4.1	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	56.305.000	3	50.886.205	3	30.300.000	3	20.458.795	0	56.305.000	0	50.876.205					Sesuai target	mengadakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara rutin	Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas	Kasubag umum dan Kepegawaian
1.5	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100		9	49.598.968	9	35.620.407	9	167.526.895	9	60.000.000	0	49.598.968	0	52.907.199	0	0	0	0				
1.5.1	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	3	360.000	3	540.000	3	22.190.260	3	20.000.000	0	360.000	0	540.000					Sesuai target	pencatatan yang rutin di buku agenda surat keluar dan surat masuk	Menyimpan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepegawaian

1.5.2	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Pelaksanaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik	3	20.802.463	3	16.058.403	3	83.829.134	3	20.000.000	0	20.802.463	0	23.834.193				Sesuai target	pembayaran SDA dan listrik sesuai dengan tagihan bulanan	Melakukan monitoring pelaksanaan konsumsi energi dan komunikasi kantor.	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.5.3	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	28.436.505	3	19.022.004	3	61.507.501	3	20.000.000	0	28.436.505	0	28.533.006				Sesuai target	terlaksananya Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.6	Terpeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100		13	17.523.201	13	24.609.503	13	111.745.826	13	44.820.000	0	17.523.201	0	34.983.004	0	0	0				
1.6.1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	17.523.201	3	24.609.503	3	96.745.826	3	40.000.000	0	17.523.201	0	34.983.004				Sesuai target	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai jadwal	Merawat Kendaraan Dinas Operasional dengan baik	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
1.6.2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	0	10	0	10	15.000.000	10	4.820.000	0	0	0	0				Sesuai target	Terpeliharaan peralatan dan mesin lainnya	merawat peralatan dan mesin lainnya	Sekretaris pada Subbag Umum dan Kepagawaian
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00																				
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85,00			0		309.000.000		257.725.000		217.565.000		0		484.000.000							
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ ditindaklanjuti	100			0	70	309.000.000		257.725.000		217.565.000		0		484.000.000				Sesuai target	Informasi publik sudah banyak tersedia secara resmi pada dan	selalu update informasi publik secara berkala	JF Pranata Humas

[illegible]

3	Menjaga Stabilitas Jaringan Intra Pemerintah (IIP)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (IIP)	100		0	0	0	98.154.535	0	1.000.000.000	100	552.463.255	0	0	0	98.154.535								
3.1	Meningkatnya Infrastruktur TIK	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik	100		0	0	0	98.154.535	0	1.000.000.000	100	552.463.255	0	0	0	98.154.535								
3.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	Pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan internet	34	0	34	98.154.535	34	1.000.000.000	34	552.463.255	34	0	34	98.154.535				Sesuai target	Pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan internet terjaga	Menjaga infrastruktur jaringan internet dan internet	KABID E-Government	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00																					
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100		0	0	0	7.950.000	0	0	100	300.000	0	0	0	3.600.000								
4.1	Meningkatnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100		0	0	0	7.950.000	0	0	100	300.000	0	0	0	3.600.000								
4.1.1	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2	Menyusun Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka	1	0	1	7.950.000	0	-	0	300.000	1	0	0	3.600.000				Sesuai target	Target dapat tercapai karena kerjasama seluruh OPD sebagai agen data dalam menyampaikan data kepada Walidata	☒ Bimtek Statistik Sektoral ☒ Pelatihan EPSS ☒ Pelatihan Satu Data Indonesia ☒ Workshop Statistik	KEPALA BIDANG STATISTIK SHINTA WIJAYA NTI, SE	

[illegible]

5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	0,33		0	0	0	0	0	11.975.000	100	300.000	0	0	0								
5.1	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	5		0	0	0	0	0	11.975.000	2	300.000	0	0	0								
5.1.1	Tersedianya Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	Pelaksanaan Sosialisasi CSIRT / TTIS	0		0		1	6.275.000	0	300.000	0	0	0				Sesuai target	Dilaksanak an sesuai jadwal	Pelaksanaa n Sosialisasi CSIRT / TTIS	Devy Ulya Rakhma nKepala Bidang Persandian	
					Pelaksanaan evaluasi oleh Tim Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	0		0		1	5.700.000	0	0	0	0	0				Sesuai target	Dilaksanak an sesuai jadwal	Pelaksanaa n Evaluasi oleh Tim Tingkat Maturitas Penangan an Insiden (TMPI)	Devy Ulya Rakhma n Kepala Bidang Persandian	
Jumlah							1.204.698.317		1.740.410.336		2.693.383.869		1.805.728.278		1.204.698.317		1.938.710.629		0		0			

Analisis terhadap capaian target Rencana Aksi Perangkat Daerah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ada 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan program yang telah dilaksanakan berjumlah 4 (empat) program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
2. Kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota dan kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD,
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota;
3. Sub Kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ada 1 (satu) sub kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 14 (empat belas) sub kegiatan.

4. Rencana Aksi yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan ada sebanyak 21 (dua puluh satu) dan rencana aksi yang belum terlaksana atau tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan ada sebanyak 3 (tiga).
5. Realisasi keuangan yang tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) sub kegiatan dan yang belum tercapai sebanyak 1 (satu) sub kegiatan. Realisasi keuangan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp.2.968.408.946,00 atau 39,88 persen dari target yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian target rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Adanya instruksi serta pengawasan langsung dari kepala dinas dalam setiap rapat evaluasi kinerja.
2. Kemampuan merealisasikan proses pengadaan lebih awal (dini) pada program infrastruktur dan layanan digital sehingga target *output* fisik mulai tercapai di awal tahun.
3. Sinergi lintas sektor yang baik, utamanya terkait penyediaan data statistik sektoral dan keterbukaan informasi public.

Sedangkan fakto-faktor penghambat pencapaian target rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa di awal tahun.

Rencana tindak lanjut perbaikan kinerja disusun sebagai langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai kendala pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun anggaran. Adapun beberapa langkah tindak lanjut perbaikan kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi berjenjang untuk memastikan seluruh program dan sub-kegiatan berjalan sesuai jadwal serta tidak tertunda akibat proses administrasi.

2. Mendorong pengelolaan pengaduan masyarakat agar ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tuntas melalui pemantauan intensif di pusat panggilan (*call center*) maupun pemantauan media.
3. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring dan evaluasi ini, dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, perkembangan realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa rencana aksi yang memerlukan percepatan pelaksanaan dan penguatan pengendalian agar target kinerja dapat tercapai secara optimal sampai akhir tahun anggaran. Permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama proses evaluasi menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana aksi periode berikutnya.

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah tindak lanjut, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan pengendalian internal guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan perencanaan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

Sungailiat, 07 Juli 2026

Nomor : T-000.71636 /DINKOMINFOTIK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Seluruh Kepala Bidang dan
Pejabat Fungsional Dinkominfotik
di
Tempat

Mengingat sekarang sudah memasuki Triwulan II Tahun Anggaran 2026 maka seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi sebagai salah satu bukti dukung untuk evaluasi SAKIP Tahun 2026 yang di upload esr.menpan.go.id. Diminta kepada Seluruh Kepala Bidang serta Pejabat Fungsional terkait untuk hadir:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sekretariat Dinkominfotik Kab. Bangka
Acara : Rapat Rencana Aksi dan Laporan Monev Rencana Aksi
Dinkominfotik Kab. Bangka Triwulan II Tahun 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kab. Bangka

Sekretaris Dinas


Wistony Claus, S.Kom
Pembina-TK. I / IV b
NIP.197902122005011008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat

Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336

E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Rabu, 08 Juli 2026
Waktu	: 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Dinkominfotik Kab. Bangka
Pimpinan rapat	: Wistony Claus, S.Kom
Peserta rapat	: Daftar Hadir Terlampir
Acara	: Rapat Rencana Aksi dan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Dinkominfotik Kab. Bangka Tahun 2026

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinkominfotik Kabupaten Bangka (Wistony Claus, S.Kom) selaku pimpinan rapat menjelaskan permasalahan yang ada :
 - a. Tim dalam Perangkat Daerah diharapkan segera menyusun Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 serta menyampaikan kepada Bupati Bangka serta tembusan kepada Bappeda Kabupaten Bangka, paling lambat tanggal 30 Juli 2026.
 - b. Berdasarkan hasil rapat di OR Bappeda Kabupaten Bangka, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diharapkan melengkapi bukti dukung Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kepala Bidang E-Government
Bidang terkait akan melengkapi dokumen data dukung matriks terkait Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Kepala Bidang Persandian
Bidang terkait akan melengkapi dokumen data dukung matriks terkait Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Kepala Bidang IKP
Bidang terkait akan melengkapi dokumen data dukung matriks terkait Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Kepala Bidang Statistik
Bidang terkait akan melengkapi dokumen data dukung matriks terkait Rencana Aksi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

An. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kab. Bangka
Sekretaris Dinas,

Wistony Claus, S.Kom
Pembina TK. I / IV b
NIP.197902122005011008

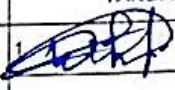
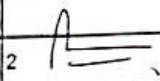
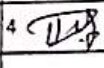
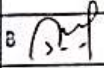
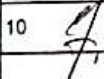
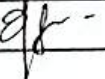
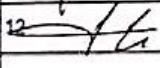
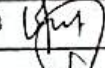
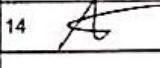
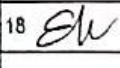
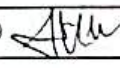
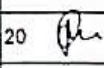
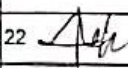
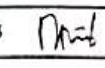
**DOKUMENTASI RAPAT RENCANA AKSI DAN LAPORAN MONEV RENCANA
AKSI TRIWULAN II DINKOMINFOTIK KAB. BANGKA TAHUN 2026
HARI RABU, TANGGAL 08 JULI 2026**



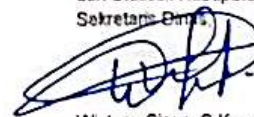
DAFTAR HADIR RAPAT

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA

HARI/TANGGAL : RABU, 08 JULI 2026
 PUKUL : 09.00 WIB S.D SELESAI
 TEMPAT : RUANG SEKRETARIAT DINKOMINFOTIK KAB. BANGKA
 ACARA : Rapat Rencana Aksi dan Laporan Monev Rencana Aksi Dinkominfotik Kab. Bangka Triwulan II Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	L / P	TANDA TANGAN
1	Wistany Claus	Sekdab	082176198799	L	
2	Sulman	Kabid Ego	08136833249	L	2 
3	SYAHSIPAH	SPT Perencanaan		L	3 
4	DEVY LILYA RACHMAN	Kabid Persandian	083157255666	L	4 
5	Yoreza Mondala P.	Prakom	0813 9448 9452	L	5 
6	Fairuz	Sandiman	0895617055961	L	6 
7	Reskydianto	Manggala Informatik	082128451326	L	7 
8	Supidah	Sandiman		P	8 
9	Tirza Rosari	Pranata Humas	082182036269	P	9 
10	M. Khudaf	Pranata	08136116116	L	10 
11	TOBU STANISIA	Stokistik	082372339808	L	11 
12	IRA S	"	087896818078	P	12 
13	LILIK H	Stafistik	085273435519	P	13 
14	Angi Yon Libowo	Persandian	082182727876	L	14 
15	KUSMIR	Sf. Perencanaan	082175661627	L	15 
16	HENDRA GUNAWAN	Prakom Ahli Muda		L	16 
17	AHMAD ZURFANSYAH	"		L	17 
18	EKO PURNOMO	STAFF		L	18 
19	ADHITYA KURNIA R.	STAFF		L	19 
20	RISKY OKTA SYLVANO	Sf. Perencanaan		L	20 
21	DINI KRISANTI	STAFF		P	21 
22	DUSY PUTRI WANGANDA	STAFF		P	22 
23	PURUL AZRI Q.	AKPO		P	23 
24	YUDHA ESA PUTRA	STAFF KEUANGAN		L	24 
25	OCTAVIUS ANWEN SAKH	"		L	25 

Sungailiat, Juli 2026
 An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
 dan Statistik Kabupaten Bangka
 Sekretaris Dinas



Wistany Claus, S Kom
 Pembina TK. I / IV b
 NIP. 197902122005011008